

Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pengelola Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)

Nasruddin^{1,*}, Surya Darni¹

¹Universitas Bumi Persada, Lhokseumawe, Indonesia

*Email Koresponden: nasruddinmdaud@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis peran pemerintah Gampong Keude Krueng, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara, dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 10–12 informan kunci, observasi partisipatif, dan studi dokumen, lalu dianalisis secara tematik dengan triangulasi dan *member checking* guna memastikan validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah gampong menjalankan peran sebagai regulator, fasilitator, dan supervisor. Sebagai regulator, peraturan gampong telah dibuat, namun penegakan disiplin keuangan masih lemah. Sebagai fasilitator, pemerintah menjembatani akses permodalan dan pelatihan, meski terhambat birokrasi. Tantangan struktural mencakup keterbatasan SDM (72% berpendidikan SMA, 28% SMP), inovasi produk rendah, administrasi manual, jaringan pemasaran sempit, dan partisipasi masyarakat minim. Meski demikian, modal sosial berupa tradisi *meuseuraya* dan keterlibatan tokoh adat (“tuha peut”) dalam mediasi konflik membentuk model kolaborasi “triangle governance plus” yang memperkuat keberlanjutan berbasis kearifan lokal. Analisis tiga pilar keberlanjutan menunjukkan BUMG berada pada fase transisi: pertumbuhan ekonomi stabil namun bergantung pada dua produk utama, kontribusi sosial terbatas pada sebagian kecil kelompok rentan, dan pengelolaan lingkungan masih tradisional. Penelitian merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan, penyederhanaan prosedur permodalan, digitalisasi administrasi, diversifikasi produk lokal, serta formalisasi model kolaborasi berbasis budaya. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan teori *collaborative governance* dengan menambahkan dimensi kultural khas Aceh, sekaligus memberikan arahan strategis bagi penguatan BUMG di wilayah serupa.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Gampong, Kesejahteraan Masyarakat, Pemberdayaan Ekonomi, Pemerintah Desa, Wilayah Pedesaan

Abstract

This study used a descriptive qualitative approach to analyze the role of the Keude Krueng village government, Kuta Makmur sub-district, North Aceh, in improving the quality of management of village-owned enterprises (BUMG). Data were collected through in-depth interviews with 10-12 key informants, participatory observation, and document study, then analyzed thematically with triangulation and member checking to ensure the validity of the findings. The results showed that the village government plays the role of regulator, facilitator and supervisor. As a regulator, gampong regulations have been made, but enforcement of financial discipline is still weak. As a facilitator, the government bridges access to capital and training, although it is hampered by bureaucracy. Structural challenges include limited human resources (72% have high school education, 28% junior high school), low product innovation, manual administration, narrow marketing networks, and minimal community participation. However, social capital in the form of

the meuseuraya tradition and the involvement of traditional leaders (“tuha peut”) in conflict mediation form a collaborative “triangle governance plus” model that strengthens local wisdom-based sustainability. Analysis of the three pillars of sustainability shows BUMGs are in a transitional phase: economic growth is stable but dependent on two main products, social contributions are limited to a small number of vulnerable groups, and environmental management is still traditional. The research recommends strengthening institutional capacity, simplifying capital procedures, digitizing administration, diversifying local products, and formalizing culture-based collaboration models. The findings contribute to the development of collaborative governance theory by adding Acehese cultural dimensions, as well as providing strategic directions for strengthening BUMG in similar regions.

Keywords: Village-Owned Enterprises, Community Welfare, Economic Empowerment, Village Government, Rural Areas

Latar Belakang

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) merupakan salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di tingkat desa, khususnya di Provinsi Aceh yang memiliki otonomi khusus. Sebagai entitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah gampong, BUMG diharapkan mampu menjadi penggerak perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal. Namun, dalam praktiknya, banyak BUMG di Aceh yang masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya profesionalisme pengelolaan, keterbatasan modal, rendahnya inovasi produk, dan lemahnya akuntabilitas keuangan (Razi et al., 2024). Kondisi ini mengindikasikan bahwa peran pemerintah gampong sebagai regulator dan fasilitator sangat krusial dalam meningkatkan kualitas pengelolaan BUMG.

Secara teoritis, keberhasilan BUMG sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan dukungan aktif dari pemerintah desa. Menurut Somiartha et al. (2024), pemerintah desa memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan regulasi yang kondusif, memberikan pendampingan manajerial, dan memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMG. Studi serupa oleh Rumodar (2025) juga menunjukkan bahwa BUMG yang berhasil umumnya didukung oleh kebijakan pemerintah desa yang proaktif dalam pengembangan SDM, akses permodalan, dan pemasaran produk.

Di tingkat internasional, konsep serupa seperti Village-Owned Enterprises (VOEs) telah menunjukkan bahwa keberhasilan VOEs sangat bergantung pada kepemimpinan lokal dan kolaborasi antara pemerintah desa dengan sektor swasta. Temuan ini sejalan dengan penelitian Harinuridin (2025) di Indonesia yang menyatakan BUMG harus meningkatkan kemampuan untuk berpartisipasi dalam inovasi terbuka dengan memanfaatkan sumber pengetahuan eksternal, baik dari dalam maupun dari luar, untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial.

BUMG dapat berkolaborasi dengan komunitas wirausaha untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa Badan Usaha Milik Desa sebagai wadah wirausaha desa mampu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan ekonomi produktif (Larasdiputra dkk., 2019).

Namun, penelitian terdahulu masih terbatas dalam mengkaji secara mendalam bagaimana pemerintah gampong di Aceh—dengan karakteristik sosial-budaya dan otonomi khususnya—dapat memperkuat pengelolaan BUMG. Selain itu, sebagian besar

studi lebih berfokus pada aspek kelembagaan dan ekonomi, tanpa banyak mengeksplorasi faktor-faktor non-ekonomi seperti peran kearifan lokal dan partisipasi masyarakat (Arifin, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi celah tersebut dengan mengeksplorasi peran pemerintah gampong dalam konteks sosio-kultural Aceh, sekaligus mengidentifikasi strategi penguatan BUMG berbasis potensi lokal.

Penelitian ini berfokus pada Gampong Keude Krueng, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, yang memiliki BUMG dengan potensi ekonomi yang cukup besar, terutama di sektor pertanian dan UMKM, namun belum menunjukkan kinerja yang optimal. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran pemerintah gampong dalam meningkatkan tata kelola BUMG serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses pengembangannya.

Penelitian ini memiliki beberapa aspek kebaruan (novelty). Pertama, studi ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis interaksi antara pemerintah gampong dan pengelola BUMG, sehingga dapat mengungkap dinamika yang tidak terlihat dalam pendekatan kuantitatif. Kedua, penelitian ini dilakukan di Gampong Keude Krueng, yang memiliki karakteristik unik sebagai wilayah dengan basis ekonomi, sehingga temuan penelitian dapat memberikan perspektif baru tentang pengelolaan BUMG di daerah berbasis sumber daya alam. Ketiga, penelitian ini mengintegrasikan konsep *good village governance* dalam analisis pengelolaan BUMG, yang masih jarang dilakukan dalam studi-studi sebelumnya.

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu akademis dan praktis. Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi keilmuan dalam studi pembangunan desa dan ekonomi lokal, khususnya terkait peran pemerintah gampong dalam penguatan BUMG. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya literatur tentang tata kelola BUMG dengan perspektif kualitatif yang mendalam serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait pengembangan usaha desa di Aceh. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah gampong dalam meningkatkan kinerja BUMG, membantu pengelola BUMG dalam memperbaiki sistem manajemen dan pengembangan usaha, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengembangan BUMG.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian tentang peran pemerintah gampong dalam meningkatkan kualitas pengelolaan BUMG di Gampong Keude Krueng menjadi penting untuk dilakukan. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang tantangan dan peluang pengembangan BUMG, sekaligus merumuskan strategi penguatan kelembagaan yang adaptif dengan kondisi lokal. Temuan penelitian ini tidak hanya relevan bagi pengambil kebijakan di tingkat desa, tetapi juga dapat menjadi pembelajaran bagi pengembangan BUMG di wilayah lain di Aceh.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Keude Krueng, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial melalui penjelasan naratif yang kaya dan kontekstual (Creswell & Poth, 2016). Penelitian ini berfokus pada eksplorasi kebijakan, program, dan praktik

pemerintah gampong dalam mendukung pengembangan BUMG, serta hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur dengan informan kunci yang meliputi kepala gampong, pengurus BUMG, tokoh masyarakat, dan anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan BUMG (total 10-12 informan). Pertanyaan wawancara dirancang untuk menggali persepsi, pengalaman, dan rekomendasi informan terkait peran pemerintah gampong dalam pengelolaan BUMG. Observasi partisipatif dilakukan selama proses pengumpulan data untuk mencatat aktivitas BUMG dan interaksi antara pemerintah gampong dengan pengelola BUMG. Selain itu, studi dokumen dilakukan dengan menganalisis peraturan desa, laporan keuangan BUMG, dan dokumen pendukung lainnya untuk memperkuat temuan dari wawancara dan observasi (Cyr & Goodman, 2024).

Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengikuti tahapan yang dikemukakan oleh Braun dan Clarke (2022), yaitu: (1) transkripsi dan familiarisasi dengan data, (2) pembuatan kode awal, (3) pencarian tema, (4) peninjauan tema, (5) pendefinisian dan penamaan tema, serta (6) penyusunan laporan. Proses analisis ini dilakukan secara iteratif untuk memastikan bahwa temuan penelitian benar-benar merepresentasikan perspektif informan dan konteks lokal. Data dari wawancara, observasi, dan dokumen dianalisis secara triangulasi untuk meningkatkan validitas penelitian (Patton, 2020). Selain itu, peneliti juga melakukan *member checking* dengan mengkonfirmasi interpretasi data kepada beberapa informan untuk memastikan akurasi temuan.

Penelitian ini memperhatikan aspek etika penelitian dengan mematuhi prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Pirani (2024) termasuk *informed consent*, kerahasiaan data, dan penghargaan terhadap partisipan. Sebelum wawancara dilakukan, semua informan diberikan penjelasan tentang tujuan penelitian dan hak mereka untuk menarik diri kapan saja tanpa konsekuensi. Nama informan dan identitas lainnya dirahasiakan dengan menggunakan kode tertentu untuk melindungi privasi mereka.

Keterbatasan penelitian ini antara lain terletak pada lingkup geografis yang terbatas pada satu gampong, sehingga temuan mungkin tidak dapat digeneralisasi ke seluruh konteks BUMG di Aceh. Namun, kedalaman analisis dan deskripsi yang rinci diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga bagi pengembangan BUMG di wilayah dengan karakteristik serupa. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengambil kebijakan di tingkat gampong dan kabupaten dalam merumuskan strategi penguatan BUMG yang lebih efektif.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pemerintah Gampong Keude Krueng menjalankan peran yang kompleks dan saling terkait dalam pengelolaan BUMG. Analisis data menunjukkan tiga peran utama yang saling melengkapi: sebagai regulator, fasilitator, dan supervisor. Sebagai regulator, pemerintah gampong telah menerbitkan peraturan gampong yang menjadi landasan hukum pengelolaan BUMG. Dokumen ini mengatur secara rinci tentang struktur organisasi, sistem pertanggungjawaban keuangan, dan mekanisme pembagian keuntungan. Namun implementasinya menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal penegakan disiplin keuangan. Temuan ini memperkuat penelitian Susanto dan Iqbal (2019) yang menemukan bahwa lemahnya penegakan aturan

merupakan masalah umum dalam pengelolaan usaha desa di berbagai negara berkembang.

Sebagai fasilitator, pemerintah gampong aktif menjembatani akses permodalan dan pelatihan. Dalam tiga tahun terakhir, telah terbentuk kemitraan dengan Lembaga pemerintah meskipun efektivitas program belum maksimal. Dana yang terserap juga kurang optimal dan terhambat oleh birokrasi yang rumit dan persyaratan yang terlalu ketat. Kondisi ini sesuai dengan temuan Albaab (2024) tentang kendala akses permodalan bagi usaha desa di Indonesia.

Pengelolaan BUMG di Gampong Keude Krueng menghadapi lima tantangan struktural yang saling berkaitan. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia yang cukup kritis. Data menunjukkan bahwa 72% pengelola hanya berpendidikan SMA, sementara 28% lainnya bahkan hanya tamatan SMP. Kondisi ini diperparah oleh minimnya pelatihan manajemen modern. Kedua, inovasi produk yang sangat terbatas. Selama tiga tahun terakhir, BUMG hanya mengembangkan dua produk baru dari total sembilan produk yang dihasilkan. Ketiga, sistem administrasi yang masih manual dan rentan kesalahan. Observasi menunjukkan bahwa 85% transaksi masih dicatat secara manual dalam buku besar. Keempat, jaringan pemasaran yang sempit dengan 86% penjualan hanya menjangkau wilayah kecamatan. Kelima, partisipasi masyarakat yang rendah dengan hanya 27% warga yang aktif berkontribusi. Temuan ini konsisten dengan penelitian Razi et al. (2024) tentang tantangan BUMG di Aceh.

Namun demikian, penelitian juga mengungkap aspek positif berupa modal sosial yang kuat. Tradisi "meuseuraya" (gotong royong) menjadi fondasi penting dalam operasional BUMG, terutama di sektor pertanian. Dalam musim panen, partisipasi masyarakat bisa mencapai 60% melalui sistem kerja gotong royong. Nilai-nilai lokal ini menjadi kekuatan unik yang tidak dimiliki oleh model bisnis modern. Temuan ini mendukung penelitian Somiartha et al. (2024) tentang pentingnya kearifan lokal dalam pengembangan ekonomi desa.

Lebih dari itu, penelitian ini berhasil memetakan model kolaborasi unik yang terbentuk antara pemerintah gampong, pengelola BUMG, dan masyarakat. Model yang disebut sebagai "*triangle governance plus*" ini menambahkan peran tokoh adat ("*tuha peut*") sebagai elemen keempat yang krusial. Tokoh adat berfungsi sebagai mediator konflik dan penjaga nilai-nilai lokal dalam pengambilan keputusan. Dalam 80% kasus sengketa yang diamati, intervensi tokoh adat berhasil menemukan solusi yang diterima semua pihak. Model ini memberikan kontribusi teoretis terhadap konsep *collaborative governance* yang dikembangkan Ansell dan Gash (2018), dengan menambahkan dimensi kultural yang spesifik untuk konteks Aceh.

Menggunakan kerangka tiga pilar keberlanjutan (ekonomi, sosial, lingkungan), penelitian ini menemukan kondisi yang beragam. Dari aspek ekonomi, BUMG menunjukkan pertumbuhan omset, namun sangat bergantung pada dua produk utama yang menyumbang 80% total pendapatan. Dari sisi sosial, BUMG berhasil menyerap 5 tenaga kerja tetap dan 13 pekerja musiman, namun hanya 18% yang berasal dari kelompok rentan. Aspek lingkungan menunjukkan praktik yang cukup baik dalam pemanfaatan sumber daya, tetapi sistem pengelolaan limbah masih tradisional. Temuan ini mengkonfirmasi penelitian Laine et al. (2021) bahwa sebagian besar usaha desa berada pada fase transisi menuju keberlanjutan penuh.

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah Gampong Keude Krueng telah menjalankan peran multidimensional sebagai regulator, fasilitator, dan supervisor dalam pengelolaan BUMG, meskipun menghadapi berbagai tantangan implementasi. Temuan kunci penelitian mengungkap bahwa efektivitas peran pemerintah gampong masih terhambat oleh beberapa faktor struktural, termasuk lemahnya penegakan regulasi, birokrasi yang rumit dalam akses permodalan, serta keterbatasan kapasitas SDM pengelola.

Namun demikian, penelitian juga mengidentifikasi potensi besar yang dimiliki BUMG melalui modal sosial dan kearifan lokal, khususnya tradisi "meuseuraya" yang telah terbukti mampu meningkatkan partisipasi Masyarakat. Model kolaborasi unik "*triangle governance plus*" yang melibatkan tokoh adat sebagai mediator konflik menjadi kontribusi teoretis penting dari penelitian ini, sekaligus menunjukkan bahwa penguatan BUMG di Aceh memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap konteks kultural lokal. Analisis keberlanjutan mengindikasikan bahwa BUMG Gampong Keude Krueng berada pada fase transisi menuju usaha berkelanjutan, dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil namun masih menghadapi tantangan dalam diversifikasi produk dan pemerataan manfaat sosial.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis. Pertama, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan melalui program pelatihan berkelanjutan yang tidak hanya fokus pada aspek teknis manajemen tetapi juga pengembangan kepemimpinan lokal. Kedua, pemerintah gampong perlu menyederhanakan prosedur birokrasi dan meningkatkan pendampingan dalam akses permodalan, khususnya untuk pengelolaan keuangan dan pelaporan yang lebih transparan. Ketiga, pengembangan sistem administrasi digital yang sederhana namun efektif menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan. Keempat, diversifikasi produk berbasis potensi lokal perlu didorong melalui pendekatan inovasi terbuka yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kelima, model kolaborasi "*triangle governance plus*" perlu diformalkan dalam peraturan gampong sekaligus diperkuat melalui penguatan peran perempuan dan kelompok rentan dalam pengambilan keputusan. Terakhir, penelitian merekomendasikan pengembangan sistem pengelolaan limbah terpadu yang memadukan pengetahuan lokal dengan teknologi tepat guna untuk meningkatkan aspek keberlanjutan lingkungan. Implementasi rekomendasi ini memerlukan komitmen politik yang kuat dari pemerintah gampong serta dukungan teknis dan pendanaan dari pemerintah kabupaten dan provinsi. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menguji efektivitas model "*triangle governance plus*" dalam konteks yang lebih beragam serta mengevaluasi dampak program penguatan kapasitas terhadap kinerja BUMG secara longitudinal.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Cakupan geografis yang terbatas pada satu gampong menyulitkan generalisasi temuan. Periode penelitian yang relatif singkat (6 bulan) juga membatasi pemahaman tentang dinamika jangka panjang. Selain itu, akses terhadap beberapa dokumen internal masih terbatas.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk: (1) memperluas cakupan wilayah penelitian, (2) menggunakan pendekatan longitudinal, dan (3) melakukan studi komparatif dengan BUMG di wilayah lain. Penelitian lebih mendalam juga diperlukan untuk mengeksplorasi model "*triangle governance plus*" dalam konteks yang berbeda.

Daftar Pustaka

- Albaab, A. U. (2024). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Syariah di Pesisir Deli Serdang Mengatasi Kendala Akses Modal Usaha Pelaku Usaha UMKM Untuk Pengembangan Bisnis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 484-496.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543-571.
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). Thematic analysis: A practical guide.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage Publications.
- Cyr, J., & Goodman, S. W. (Eds.). (2024). *Doing good qualitative research*. Oxford University Press.
- Harinurdin, E., Laksmono, B. S., Kusumastuti, R., & Safitri, K. A. (2025). Community Empowerment Utilizing Open Innovation as a Sustainable Village-Owned Enterprise Strategy in Indonesia: A Systematic Literature Review. *Sustainability*, 17(8), 3394.
- Laine, M., Tregidga, H., & Unerman, J. (2021). *Sustainability accounting and accountability*. Routledge.
- Larasdiputra, G. D., Anggiriawan, P. B., Kawisana, P. G. W. P., & Putra, I. G. B. N. P. (2019). The Role of Village-Owned Enterprises in Enhancing the Rural Economy. *International Journal of Advances in Social and Economics*, 1(2), 60-66.
- Patton, M. Q. (2014). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice*. Sage Publications.
- Pirani, S. (2024). Navigating research ethics: Strategies for preventing and addressing research misconduct. *International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews*, 3(02), 96-104.
- Razi, S. F., Saiban, K., & Hariyanto, T. (2024). Governance of the Gampong-Owned Business Entity (BUMG) Jeulanga Mata Ie Bandar Dua District Pidie Jaya District: Study of Policy Implementation Based on Pidie Jaya Regent Regulation Number 30 of 2020 Concerning the Establishment, Administration, Management, and Dissolution of Gampong-Owned Enterprises. *International Journal of Research in Social Science and Humanities (IJRSS) ISSN: 2582-6220, DOI: 10.47505/IJRSS*, 5(1), 121-141.
- Rumodar, H. R. (2025). *Fasilitasi Pemerintah Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD" APMD").
- Somiartha, P., Utama, I. M. S., Sudibia, I. K., & Dewi, M. H. U. (2024). Determinants of the performance of village-owned enterprises in improving village development performance. *International Journal of Professional Business Review: Int. J. Prof. Bus. Rev.*, 9(1), 17.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Efektifitas Peranan Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui BUMDes Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal yang Berdaya Saing Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Proceedings Universitas Pamulang*, 1(1).